

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIAK RW.02
KELURAHAN SRI MERANTI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU 2015-2016**

Oleh:

Audina Reihan

Email : audina.reihan.ar@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761)63277

ABSTRACT

AUDINA REIHAN, NIM: 1301156864, Community Participation Of Community-Based Integrated Technology Processing Program in Siak Watershed Area On RW.02 of Sri Meranti Sub-district, Rumbai District City Of Pekanbaru 2015-2016. Supervisor: Adlin

Most of the slums in the city of Pekanbaru are areas located around the Siak river. In addition to slum areas, river basins mostly have problems related to healthy lifestyles because most of the people who live in watershed areas use river water for daily life. The siak river flows have been polluted with rubber mill waste so the river water which is the source of life is not suitable for daily life. As the result, the community is not growing and not prosperous. In terms of formulating development strategies to improve the welfare of the community, it is necessary to pay attention to the general conditions and potentials of the said region. In addition, also considered the main issues and obstacles that exist in the community. One of the factors that affect the welfare of the community is the declining of the slum area, the number of poverty and the decrease in the number of unemployed. The Community Based Integrated Technology Processing Program in Siak Watershed Area is one of the government's ways to empower the people who live along the Siak river, namely RW 02 of Sri Meranti Sub-district, Rumbai District. With this program, it is hoped that the community can change the unhygienic lifestyles by no longer constructing the MCK (toilet, bath, and wash) along the river stream, consuming clean water and inviting the community to do the same as running the government program as a joint effort.

In this case community participation is needed to achieve the goal of the establishment of Community-Based Integrated Technology Processing Program in Siak Watershed Area. However, after a year there has been no change in society due to lack of community participation in the program. People are still reluctant to consume clean water that has been distilled and still using the public bathroom on the edge of the river for daily needs and polluted the river water. In addition, there

are obstacles in running the existing program so that the Community Based Integrated Technology Processing Program in the Siak Watershed Area is not on target.

The research method used in this research is descriptive research, with quantitative approach supported by qualitative where the author distributed questionnaires to the respondents and interviewed a number of figures as well as direct observation in the field to get a picture directly about the real condition that there is happening in community and installation buildings.

The result of the research shows that in general, the participation of RW 02 community of Sri Meranti Sub-district, Rumbai District in the implementation of Community Based Integrated Technology Processing Program in Siak Watershed Area is not doing so well. There are factors that become obstacles of participation from RW 02 community of Sri Meranti Sub-district, Rumbai District such as community's mindset influenced by education level and public income, and lack of government supervision.

Keywords: community, community participation, watershed area, Sri Meranti.

PENDAHULUAN

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah ialah salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini dapat menyangkut pendidikan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Strategi Pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Karena itu strategi yang baik dan tepat akan dapat menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal merumuskan strategi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan. Selain itu juga diperhatikan permasalahan pokok dan kendala yang ada pada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga beberapa diantaranya

ialah berkurangnya kawasan kumuh, angka kemiskinan serta berkurangnya jumlah pengangguran.

Sebagian besar kawasan kumuh di kota Pekanbaru adalah daerah yang terletak sekitar aliran sungai Siak. Selain kawasan kumuh, daerah aliran sungai sebagian besar memiliki masalah terkait pola hidup sehat karena sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan daerah aliran sungai menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Aliran sungai siak telah tercemar dengan limbah pabrik karet sehingga air sungai yang menjadi sumber hidup tak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru (Sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bekerjasama untuk mensiasati masalah tersebut

dengan menerapkan beberapa program pemberdayaan dan pemanfaatan dikawasan daerah aliran sungai (DAS) siak disalah satu kelurahan di Kota Pekanbaru.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat adalah instansi yang bergerak dibidang penelitian. Tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.. Berikut adalah fungsi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
4. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangandi bidang perumahan dan permukiman;
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
6. Pelaksanaan urusan keuangan, ketata usahaan, dan umum;

7. Penyiapan penyusunan standar dan pedoman ; dan
8. Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Fungsi diatas menunjukkan bahwa Pusat Penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman berfungsi sebagai sarana pemberian informasi teknis dalam membantu Pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengatasi masalah-masalah teknis terkait bidang perumahan dan permukiman. Pada tahun 2015 telah ditandatangani sebanyak 13 (tiga belas) dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan berbagai instansi untuk mengatasi masalah bidang permukiman seperti pengembangan teknologi perumahan, pembinaan teknis perencanaan dan pembangunan, termasuk diantaranya pengelolaan air minum. Untuk mengatasi masalah terkait bidang perumahan dan permukiman maka dari itulah disini Puslitbang memproduksi teknologi peningkatan kinerja air minum di beberapa daerah di Indonesia melalui program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Lokasi DAS. Sebelumnya terkait program pengelolaan air minum pada tahun 2015 puslitbang juga bekerjasama dengan PT. Tekno Mas Tirta untuk pengembangan instalasi pengelolaan air (IPA) nusantara.

Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Lokasi DAS pada tahun 2013 ditempatkan di hulu DAS Citarum yang terdapat di Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan Desa Mekar Mukti Kecamatan Cihampelas

Kabupaten Bandung Barat. Kemudian pada tahun 2014 program ini ditempatkan di hulu DAS Ciliwung dan Brantas yang terdapat di Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jatim.

Pada tahun 2015 Puslitbang perumahan dan permukiman membentuk program yang sama di Provinsi Riau guna mengatasi penurunan kualitas sungai Siak yang tercemar oleh limbah domestik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan pelestarian. Untuk itu bekerjasama dengan Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya yang kini telah berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru menetapkan penempatan teknologi pengelolaan air limbah kawasan DAS Siak di RW 02 kelurahan Sri meranti Kecamatan Rumbai.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.. Fungsi bidang kawasan permukiman berfungsi diantaranya sebagai:

1. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
2. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang kawasan permukiman.

3. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan program kerja, kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, peraturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan dibidang kawasan permukiman serta pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan dibidang kawasan permukiman.
4. Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
5. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan penngendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bidang kawasan permukiman.
6. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan permukiman kumuh.
7. Mencegah timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
8. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.

Penempatan dipilih di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai karena Kelurahan Sri Meranti adalah kelurahan yang berada dipinggiran sungai siak. Selain itu juga terdapat banyak pemukiman kumuh dan adanya lahan yang cukup untuk membangun Instalasi air minum, bank sampah serta kamar mandi umum untuk masyarakat sekitar yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat di DAS Siak. Selain itu juga telah dilakukannya survey kepada masyarakat dengan responden yakni warga RW 02 kelurahan Sri Meranti.

Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Lokasi DAS ini memiliki tiga program diantaranya:

1. Instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi air siap minum

Instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi air siap minum adalah sistem penyediaan air minum dimana suplai air minum yang berawal dari pengambilan air baku melalui pengolahan, hingga sampai ketangan konsumen sebagai air minum yang memenuhi standar

2. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pendekatan 3R

Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melakukan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle) adalah pengelolaan sampah yang menggunakan 3 pendekatan yaitu 1) Membatasi, 2) Menggunakan kembali, dan 3) Daur ulang

3. Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter

Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter yang berfungsi sebagai penyaring air limbah agar jernih kembali dan dapat digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci di MCK umum yang disediakan.

Tercapainya tujuan program ini berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Namun setelah setahun berjalan tidak ada perubahan pada masyarakat

karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Masyarakat masih enggan untuk mengkonsumsi air bersih yang telah disuling dan masih menggunakan MCK dipinggir sungai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga air sungai menjadi tercemar. Selain itu juga terjadi kendala dalam menjalankan program program yang ada sehingga Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak tidak tepat sasaran.

Dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak RW.02 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016”**

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara antara peneliti dengan informan. Dengan responden adalah masyarakat RW.02 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai dan informan ialah Lurah Sri Meranti, Pengurus, dan ketua pemuda. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan hasil kuesioner dan wawancara. Data yang peneliti peroleh baik dari data primer maupun sekunder akan diolah menggunakan teknik deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa

disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomi research*), seperti telah disebutkan sebelumnya, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti yang mana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat di Kawasan DAS siak.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan program pengelolaan terpadu ini. Tujuan dari program ini tidak lain ialah untuk membantu masyarakat di kawasan daerah aliran sungai siak yaitu RW02 dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih sebagai syarat utama hidup sehat dengan menyaring air limbah menjadi air siap minum dan dapat digunakan sehari-hari.

1. Instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi air siap minum

Tujuan dari program ini tidak lain ialah untuk membantu masyarakat di kawasan daerah aliran sungai siak yaitu RW02 dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih sebagai syarat utama hidup sehat dengan menyaring

air limbah menjadi air siap minum dan dapat digunakan sehari-hari. Berikut adalah tanggapan responden mengenai partisipasi dalam program Instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi air siap minum.

Tabel 3.3 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Terhadap Program Instalasi pengolahan air limbah untuk menjadi air siap minum Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	19	20,21
Setuju	30	31,92
Tidak Setuju	39	41,49
Sangat Tidak Setuju	6	6,38
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 3.3 menjelaskan tentang tanggapan responden mengenai keikutsertaan dalam menjalankan program Instalasi pengolahan air limbah menjadi air siap minum. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi. Responden terbanyak menjawab tidak setuju dengan jumlah 39 orang (41,49%) dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (6,38%).

2. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah pengelolaan sampah yang menggunakan 3 pendekatan yaitu 1)

Membatasi, 2) Menggunakan kembali, dan 3) Daur ulang. Tujuannya adalah untuk meminimalisir sampah yang ada. Berikut adalah tanggapan responden mengenai partisipasi dalam program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat:

Tabel 3.4 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Terhadap Program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	0	0
Setuju	2	2,13
Tidak Setuju	71	75,53
Sangat Tidak Setuju	21	22,34
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Pada tabel 3.4 mayoritas responden menjawab tidak setuju dengan jumlah responden sebanyak 71 orang (75,53%) dan paling sedikit adalah responden yang menjawab setuju dengan jumlah responden sebanyak 2 orang (2,13%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

3. Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter

Berfungsi sebagai penyaring air limbah agar jernih kembali dan dapat digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci di MCK umum yang disediakan. Berikut adalah tanggapan responden mengenai partisipasi dalam program Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.5:

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Terhadap Program Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	0	0
Setuju	1	1,08
Tidak Setuju	70	74,46
Sangat Tidak Setuju	23	24,46
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 3.5 menjelaskan tentang tanggapan responden mengenai keikutsertaan dalam menjalankan Teknologi pengolahan air limbah sistem bio filter. Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi. Responden terbanyak menjawab tidak setuju dengan jumlah 70 orang (74,46%) dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab setuju sebanyak 1 orang (1,08%).

B. Bentuk dan Tahap Partisipasi Masyarakat

Dalam membentuk sebuah program agar berjalan dengan baik diperlukan sosialisasi yang tepat dari pihak tertentu agar program dapat tepat sasaran. Sosialisasi dilakukan pada tahap awal pendirian suatu program

1. Pembuatan Keputusan pada Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat dari Pemerintah

Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mengetahui cara kerja

program serta dapat berpartisipasi agar tujuan dari program ini dapat tercapai. Berikut adalah Tanggapan responden mengenai sosialisasi program dari pemerintah yang dijelaskan pada tabel 3.6:

Tabel 3.6 Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi dari Pemerintah Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	33	35,1
Setuju	45	47,88
Tidak Setuju	13	13,83
Sangat Tidak Setuju	3	3,19
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menjalankan program pengelolaanteknologi terpadu berbasis masyarakat di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Siak di RW02 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai tahun 2015-2016. Mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 orang (47,88%) dan paling sedikit responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (3,19%).

2. Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat

Untuk itu program ini dikelola oleh masyarakat RW02 sendiri yang telah dilatih untuk menjadi operator disetiap program serta mengelola dari pemeliharaan gedung hingga keuangan. Berikut adalah tanggapan responden mengenai kinerja operator pada tiap-tiap program.

Tabel 3.7 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Operator Pada Tiap-tiap Program Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	11	11,7
Setuju	25	26,59
Tidak Setuju	50	53,19
Sangat Tidak Setuju	8	8,52
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan kinerja operator. Responden terbanyak menjawab tidak setuju sebanyak 50 orang (53,19%) dan paling sedikit responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (8,52%).

3. Pemeliharaan dan Perawatan Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat

Pemeliharaan baik gedung maupun alat-alat dilakukan untuk memelihara fasilitas yang ada pada program sehingga fasilitas tersebut terjaga pada kondisi yang dapat diterima atau digunakan. Berikut adalah tanggapan responden mengenai pemeliharaan dan perawatan gedung instalasi.

Tabel 3.9 Tanggapan Responden Mengenai Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Instalasi Masyarakat Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	4,25
Setuju	30	31,91
Tidak Setuju	55	58,52
Sangat Tidak Setuju	5	5,32
Jumlah	94	100

Sumber: Data Olahan 2017

Pada tabel 3.8 mayoritas responden cenderung tidak setuju mengenai pemeliharaan . Responden terbanyak menjawab tidak setuju sebanyak 50 orang (53,19%) dan paling sedikit responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (8,52%).

4. Pengawasan Terhadap Program Pengelolaan Teknologi Terpadu Berbasis Masyarakat

Dengan melakukan pengawasan dapat diketahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut adalah tanggapan responden mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Tabel 3.9 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Tahun 2015-2016

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	7	7,44
Setuju	68	72,35
Tidak Setuju	17	18,09
Sangat Tidak Setuju	2	2,12

Jumlah	94	100
--------	----	-----

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa mayoritas responden setuju dengan pada pengawasan yang dilakukan pemerintah. Responden terbanyak menjawab setuju sebanyak 68 orang (72,35%) dan paling sedikit responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2,12%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah dengan baik melakukan pengawasan pada gedung instalasi.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, dan komunikasi antar masyarakat, dalam hal ini masyarakat RW02 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai. Tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir suatu masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang maka pola pikirnya semakin kritis dalam menghadapi perubahan pola hidup. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka pola pikir suatu masyarakatpun semakin susah untuk merubah kebiasaan.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi sikap dan perilaku, pengetahuan, dan adat istiadat. Sikap dan perilaku masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara cepat sehingga perubahan pola hidup dalam suatu

masyarakat dapat terhambat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak bersedia menerima arahan atau anjuran dari luar yang sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

3. Faktor Birokrasi

Adapun selain tiga faktor diatas terdapat faktor birokrasi yang menghambat partisipasi masyarakat. Faktor ini dapat dijumpai dilingkungan pemerintah. Seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedural formal yang kompleks

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembina yang bertujuan untuk mengawasi program yang telah diberikan sepenuhnya kepada masyarakat. dalam hal ini masyarakat sudah menyadari apa yang harus dilakukan agar masyarakat lain berpartisipasi, yaitu dengan mengganti operator yang tinggal di gedung instalasi. Namun masyarakat merasa sulit untuk menemui Tim UPT(Unit Pelaksana Teknis).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan (Pendekatan Partisipatif-Tipologi-Strategi dan Konsep Desa Pertumbuhan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohman, Ainun dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averros Press.

Sumber Jurnal:

- Sevianty, Dea. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. eJournal Administrasi Negara 2013
- Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi. *Pertisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri*. Prosiding KS: Riset & PKM. Vol: 2

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pasal 5
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pengolahan SDA